

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA – PD) 2017-2022



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2020

-*KATA PENGANTAR

Puji syukur atas perkenan dan ridha Allah SWT., Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan segala keterbatasan dan Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah selesai menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2017-2022. Selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah memberikan bahan, masukan, dan verifikasi terhadap proses penyusunan dan penetapan dokumen perubahan renstra ini.

Perubahan Renstra perangkat daerah dimulai dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perubahan Renstra sangat penting dilakukan bagian dari evaluasi untuk memperbaiki sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan harapan akan meningkatkan nilai dan predikat SAKIP pemda maupun perangkat daerah. Dokumen renstra merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang wajib dimiliki, dan memiliki peran penting sebagai pedoman bagi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta seluruh aparaturnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang RPJMD tahun 2017-2022. Isi Renstra ini mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta RPJMD tahun 2017-2022.

Demikian Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2017-2022 Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini disusun, diharapkan perangkat daerah ini dapat melaksanakan program dan kegiatannya dengan efektif, efisien dan bersasaran, berhasil dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Sekian dan terima kasih, wassalamualaikum Wr.Wb.

Pangkalpinang, Maret 2020
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

YAMOWA'A HAREFA, AP.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740130 199102 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBAR PELAYANAN SATPOL PP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.....	5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	5
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	13
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah..	20
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	22
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
3.2 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	23
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota...	26
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis.....	27
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	29
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	29
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	32
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	39
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	51
BAB VIII PENUTUP.....	52

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Jumlah Anggota Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Status Kepegawaian per Desember 2019.....	13
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Pangkat dan Golongan, serta Jenis Kelamin per Desember 2019.....	14
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Eselonering dan Jenis Kelamin per Desember 2019.....	14
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Tingkat Pendidikan per Desember 2019	14
Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Non PNS Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Tingkat Pendidikan per Desember 2019.....	15
Tabel 2.6 Jumlah Sarana dan Prasarana Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per Desember 2019.....	15
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Program Perangkat Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	18
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam juta rupiah)..	19
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Satpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	22
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	25
Tabel 3.3 Analisis Renstra K/L Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.....	26
Tabel 3.4 Komparasi Sasaran Renstra Satpol PP Provinsi terhadap Sasaran Renstra Kabupaten/Kota.....	27
Tabel 4.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran, Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022.....	30
Tabel 5.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	33
Tabel 5.2 Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT).....	36
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	40

Tabel 6.2	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan serta Program Wajib Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	47
Tabel 6.3	Rumusan Perhitungan Outcome/Indikator Sasaran Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	49
Tabel 6.4	Rumusan Perhitungan Outcome/Indikator Program Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	50
Tabel 7.1	Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	51

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terpilih pada periode 2017-2022 memiliki cita-cita, atau keadaan yang diinginkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, cita-cita atau keadaan yang diinginkan dimaksud harus dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pasal 5 menyebutkan "*RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah, yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah-daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif*". Sehubungan dengan hal diatas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

Dengan berpedoman peraturan daerah RPJMD diatas, sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang memiliki tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra), dan ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 7 menyebutkan "*Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif*".

Berdasarkan tahapan penyusunannya Renstra SKPD terdiri dari, pertama, persiapan penyusunan Renstra SKPD, meliputi penyusunan agenda

kerja tim dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Kedua, penyusunan rancangan Renstra SKPD, meliputi perumusan rancangan Renstra SKPD, dan penyajian rancangan Renstra SKPD. Ketiga, penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD, dan keempat adalah penetapan Renstra SKPD. Selain berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk menjamin keharmonisan Renstra SKPD dengan pihak terkait, maka dalam penyusunannya juga perlu memperhatikan dari Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Satpol PP Kabupaten atau Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Setelah Renstra SKPD ditetapkan, untuk melaksanakan program kegiatan setiap tahun, maka ditetapkan Rencana Kerja (Renja) SKPD, yaitu dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Pertimbangan untuk memperbaiki sistem akuntabilitas pemerintah daerah, dengan harapan mendapatkan nilai atau predikat SAKIP yang lebih baik, maka pemerintah daerah bersama perangkat daerah mengubah dokumen renstra Satpol PP yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan perubahan Renstra Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- h. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor xx Tahun 2020 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.
- i. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- k. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dimaksudkan agar SKPD ini memiliki rumusan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang disepakati untuk periode perencanaan 5 (lima) tahun. Tujuan dari Renstra SKPD ini adalah menjadi pedoman dalam penyusunan Renja SKPD, yaitu dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun, menjadi panduan bagi seluruh unit yang ada pada Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melangkah dan bertindak untuk mencapai tujuan, dan sasaran, melalui program dan kegiatan yang jelas dan telah ditetapkan, serta mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dalam hal perencanaan pembangunan yang

dilaksanakan SKPD. Lebih jauh lagi Renstra SKPD ini dijadikan pedoman bagi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah atau Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam RPJMD serta memberi kepastian hukum terhadap perubahan renstra yang telah dilakukan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 ini meliputi, Bab I Pendahuluan, yang mencakup latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan. Bab II Gambaran Pelayanan Satpol PP, yang mencakup tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, dan tantangan dan peluang pelayanan perangkat daerah. Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, yang mencakup indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil daerah terpilih, telaahan renstra K/L dan renstra kab/kota, penentuan isu-isu strategis. Bab IV Tujuan dan Sasaran. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan. Bab VII Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD. Bab VIII Penutup.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pada awalnya Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk pada tahun 2008 melalui Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan ketika itu eselonering II b. Namun untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dimana amanat PP itu diharuskan bagi Satuan Polisi Pamong Praja tingkat provinsi eselonering II a, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerbitkan Perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan perda diatas, Satpol PP Provinsi Kepulauan memiliki tipelogi A.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah, Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

a. Kepala Dinas, yang membawahi:

1. Sekretariat
2. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
3. Bidang Peningkatan Personil
4. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
5. Bidang Perlindungan Masyarakat

b. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang membawahi:

1. Subbagian Perencanaan
2. Subbagian Umum
3. Subbag Keuangan

c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang membawahi:

1. Seksi Deteksi Dini
 2. Seksi Penertiban, Operasi dan Pengendalian
- d. Bidang Peningkatan Personil, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang membawahi:
1. Seksi Pembinaan
 2. Seksi Pengembangan
- e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang membawahi:
1. Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan
 2. Seksi Pengawasan, Penyuluhan dan Hubungan Antar Lembaga
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang membawahi:
1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat dan Pemadam Kebakaran
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Fungsional PPNS
1. Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas melaksanakan memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugasnya, Kasat Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. Penyelenggaraan administrasi satuan polisi pamong praja;
 - d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - e. Penyelenggaraan dan pengordinasian UPTD;

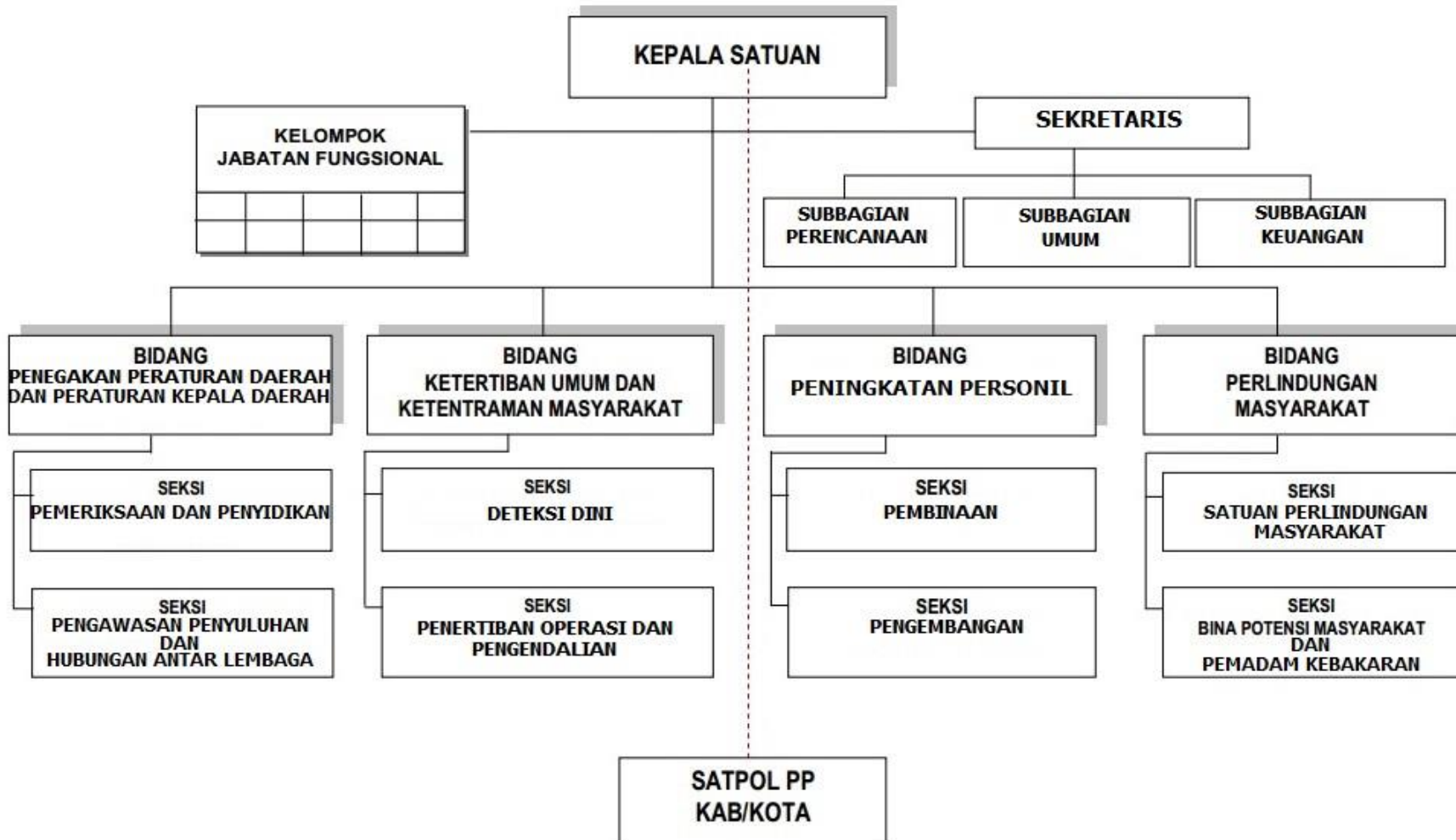
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - g. Penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional, dan
 - h. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
2. Sekretariat, mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosi, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi satuan polisi pamong praja meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengoordinasikan bidang-bidang. Untuk melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyelenggarakan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
 - b. Penyelenggarakan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
 - c. Penyelenggarakan evaluasi dan pelaporan satuan polisi pamong praja;
 - d. Penyelenggaraan pembinaan, dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawasi, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang ini menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan dan pengendalian di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan pihak satuan polisi pamong praja kabupaten/kota, instansi dan institusi terkait;

- d. Penyelenggaraan pengkajian dan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, deteksi dini, penertiban dan pemeliharaan;
 - e. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - f. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
 - g. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
4. Bidang Peningkatan Personil, mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi, dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan personil satuan polisi pamong praja. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang ini menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan verifikasi dan evaluasi penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis pengelolaan peningkatan personil polisi pamong praja;
 - b. Penyelenggaraan verifikasi bahan dan rumusan kebijakan operasional peningkatan personil satuan polisi pamong praja;
 - c. Penyelenggaraan verifikasi bahan kebijakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan dasar, pelatihan teknis dan pengembangan fungsional satuan polisi pamong praja;
 - d. Penyelenggaraan verifikasi bahan kebijakan pengelolaan data, operasional dan administrasi bagi PPNS dan polisi pamong praja;
 - e. Penyelenggaraan verifikasi bahan kebijakan peningkatan kemampuan dan wawasan PPNS dan polisi pamong praja;
 - f. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang peningkatan personil;
 - h. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan barang serta sarana dan prasarana bidang peningkatan personil;
 - i. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan non yustisial;

- j. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian bidang peningkatan personil;
 - k. Pelaksanaan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - l. Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pembuatan laporan;
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
5. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengakkan perauran daerah dan peraturan kepala daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang ini mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program penegakkan pada bidang penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian dan pengendalian penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan PPNS kabupaten/kota, satuan polisi pamong praja kabupaten/kota, instansi dan institusi terkait;
 - d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - f. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
6. Bidang Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bidang Perlindungan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang ini mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan verifikasi perencanaan anggaran, program kerja dan petunjuk teknis operasional dan penyelenggaraan satuan perlindungan masyarakat, bina potensi masyarakat dan pemadam kebakaran;
- b. Penyelenggaraan verifikasi pendataan, pembinaan, pelatihan dan pemetaan sumber daya anggota satuan perlindungan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan perlindungan masyarakat, bina potensi masyarakat dan pemadam kebakaran;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional sistem dan implementasi fasilitasi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, pilpres dan pilkada;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian petugas satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana dan kebakaran;
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian satuan perlindungan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan satuan polisi pamong praja;
- g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian mediasi, komunikasi dan fasilitasi anggota satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- h. Penyelenggaraan verifikasi pengumpulan dan analisa data pemetaan daerah rawan bencana serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pembinaan teknis operasional dan mobilisasi satuan perlindungan masyarakat/satuan kerja/lembaga perangkat daerah untuk pelayanan perlindungan masyarakat dan penanganan bencana kebakaran dan upaya pertahanan negara;
- j. Penyelenggaraan dan pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat;
- k. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan dan pengendalian bidang perlindungan masyarakat;

1. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara,
dan
- m. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di dukung oleh beberapa sumber daya yang ada, diantara sumber daya manusia. Dapat dilihat pada tabel 2.1 jumlah anggota Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per Desember 2019 sebanyak 226 orang, yang terdiri 77 anggota Satpol PP yang berstatus PNS, dan 149 anggota Satpol PP yang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT). Berdasarkan pangkat dan golongan anggota Satpol PP yang PNS, dapat dilihat pada tabel 2.2, pangkat dan golongan tertinggi adalah Pembina Utama Muda/IVc, dan terendah adalah Pengatur Muda Tk I/IIb. Pangkat dan golongan paling banyak adalah Penata Muda Tingkat I/IIIb sebanyak 17 orang, dan Pengatur Tingkat I/IIId sebanyak 16 orang.

Tabel 2.1
Jumlah Anggota Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Menurut Status Kepegawaian per Desember 2019

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	77	34,07
2	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	149	65,93
	Jumlah	226	100

Menurut formasi eselon jabatan struktural, seperti yang ditampilkan pada tabel 2.3, Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 1 (satu) jabatan eselon II a yang diduduki oleh Kepala Satuan (Kasat), sekaligus jabatan eselon tertinggi, 5 (lima) jabatan eselon II a, 11 jabatan eselon IV a, dan 61 pejabat atau anggota non eselon, dan jabatan eselon tersebut sudah terisi semua.

Sedangkan menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, seperti yang ditampilkan pada tabel 2.5, pendidikan tertinggi yang ditamatkan anggota Satpol PP yang berstatus PNS paling banyak adalah Strata 1 (S1) sebanyak 35

orang dan tamatan SLTA sebanyak 34 orang, dan 8 orang tamatan Strata-2 (S2), dan selebihnya tamatan Diploma III (DIII)

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai (PNS) Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Pangkat Golongan, serta Jenis Kelamin Per Desember 2019

No.	Pangkat Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Muda/IVc	1	0	1
2	Pembina Tk. I/IVb	3	0	3
3	Pembina/IVa	2	2	4
4	Penata Tk. I/ IIIId	10	1	11
5	Penata/IIIc	9	-	9
6	Penata Muda Tk. I/IIIb	17	-	17
7	Penata Muda/ IIIa	1	-	1
8	Pengatur Tk. I/IIId	16	-	16
9	Pengatur/ IIc	2	-	2
10	Pengatur Muda Tk. I/IIb	12	1	13
11	Pengatur Muda/IIa	-	-	-
	Jumlah	73	4	77

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Eselonering dan Jenis Kelamin Per Desember 2019

No.	Pangkat Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	IIa	1	0	1
2	IIIa	4	1	5
3	IVa	10	1	11
4	JFU	13	0	13
5	JFT	45	2	47
	Jumlah	73	4	77

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Tingkat Pendidikan Per Desember 2019

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pasca Sarjana/S2	7	1	8
2	Sarjana/S-1	33	2	35
3	Diploma-III	-	-	0
4	SLTA	33	1	34
	Jumlah	73	4	77

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Non PNS Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Menurut Tingkat Pendidikan per Desember 2019

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana/ S-1	17
2	Diploma-III	4
3	SLTA	128
	Jumlah	149

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Kinerja pelayanan Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.5, selain memiliki alat-alat kantor dan rumah tangga seperti komputer, printer, kursi, dan meja, Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki alat angkutan seperti sepeda motor, mobil pick up, mobil mini bus, mobil dalmas, alat-alat studio dan komunikasi seperti HT, pesawat telepon, kamera digital, handycam dan lain-lain, kemudian juga memiliki alat-alat kewanaman seperti helm, tameng, dan pakaian PHH.

Tabel 2.6
Jumlah Sarana dan Prasarana
Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per Desember 2019

No.	Kelompok dan Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Alat Angkutan - Sepeda Motor - Mobil Pick Up - Mobil Mini Bus - Mobil Dalmas	12 3 4 2
	Jumlah alat angkutan	21
2.	Alat-Alat Studio dan Komunikasi - HT - Pesawat Telp - Faximile - Camera Digital - Handycam - Wireless - Mini Megaphone - Proyektor	9 1 6 1 1 1 2 1

	- Kabel Reperter	1
	- Antena Reperter	4
	- Rick	1
	- Repiter	1
	- Menara	
	Jumlah alat-alat Studio dan Komunikasi	28
3.	Alat-Alat Keamanan	
	- Tameng	93
	- Helm	31
	- Pakaian PHH	31
	Jumlah alat-alat keamanan	155

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sejak dibentuk pada tahun 2008, untuk mendukung visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD 2007-2012 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan, namun demikian yang menjadi catatan bahwa pada periode tersebut Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum menetapkan indikator kinerja utama, sasaran kinerja dan target kerjanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan indikator kinerja digunakan untuk Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) yang berkaitan dengan Satpol PP adalah rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk, jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk, rasio siskamling per jumlah desa/kelurahan, angka kriminalitas, dan jumlah demonstrasi. Sejalan dengan PP diatas, kinerja pelayanan perangkat daerah ditunjukkan dalam tabel 2.6, dimana dari tabel dimaksud terlihat ada indikator yang tercapai dan belum tercapai pada tahun awal perencanaan renstra.

Seperti yang dilihatkan pada tabel 2.7 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk dari 2 (dua) kelompok belanja, yakni belanja tidak langsung dan belanja langsung. Jika belanja langsung digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai, maka belanja langsung digunakan untuk membiayai

program dan kegiatan. Tren atau perkembangan dari sisi anggaran maupun realisasi anggaran selama periode 2018-2019 adalah menaik untuk total belanja (belanja tidak langsung+belanja langsung).

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Program Perangkat Daerah
Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Angka kriminalitas	-	-	-	13,00	-	-			9,91	9,81				76,23	1,00	-	-	-
2.	Jumlah Linmas	-	-	-	10510	10510	10510	10510	10510	3514	3997				33,43	13,74	-	-	-
3.	Persentase penurunan pelanggaran tibumtranmas	-	-	-	95	90	85	80	75	63	27	-	-		66,31	57,14	-	-	-
4.	Persentase penindakan pelanggaran tibumtranmas	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100				100	100	-	-	-
5.	Cakupan penegakkan perda	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100				100	100	-	-	-
6.	Persentase peningkatan kualitas linmas dalam penyelenggaraan kantrantibmas	-	-	-	9,22	14,96	17,68	20,4	23,12	9,22	11,47				100	24,40	-	-	-
7.	Persentase peningkatan kualitas linmas dalam penanganan bencana dan kebakaran	-	-	-	10,28	16,33	22,38	28,43	34,48	6,05	8,86				58,85	46,44	-	-	-

Tabel 2.8
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
 Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam juta rupiah)

Uraian Belnaja	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung (BTL)	9.926,86	12.351,41				9.562,00	10.967,50				96,32	88,79				24,42	14,69
Belanja Langsung (BL)	8.129,03	10.390,16				7.772,51	9.567,60				95,61	92,08				27,81	23,09
Total Anggaran (BTL+BL)	18.055,89	22.741,58				17.334,51	20.535,11				96,00	90,29				25,95	18,46

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah

Tantang dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah pada lima tahun mendatang diperoleh dari analisis pelayanan perangkat daerah dan beberapa Renstra perangkat daerah kabupaten dan kota.

2.4.1 Tantangan

Tantangan pelayanan SKPD pada 5 (lima) tahun mendatang adalah:

1. Bagaimana menciptakan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi tertib dan tentram di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Bagaimana upaya membuat masyarakat, orang, badan hukum patuh terhadap perda dan peraturan kepala daerah sesuai kewenangan dan tugas Satpol PP.
3. Bagaimana memberdayakan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selain hal tersebut Satlinmas juga ditugaskan berperan aktif dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pra dan pasca pemilihan umum (Pilpres, Pileg, dan Pilkada) serta membantu penanggulangan bencana.
4. Bagaimana membangun sinergitas kerjasama antar Satpol PP Provinsi dengan Satpol PP Kabupaten/Kota, serta kerjasama dengan Polri dan TNI;
5. Bagaimana meningkatkan kualitas atau kemampuan anggota satpol pp ditengah-tengah tuntutan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
6. Bagaimana memaksimalkan dan melaksanakan semua tugas pokok, fungsi dan kewenangan Satpol PP, dan memaksimalkan peran dan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

2.4.2 Peluang

Peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah pada lima tahun mendatang adalah:

1. Keberadaan dan semua tugas pokok, fungsi dan kewenangan Satpol PP dijamin oleh produk hukum Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan polisi Pamong Praja.
2. Seluruh perangkat daerah Satpol PP baik tingkat provinsi, kabupaten, dan kota memiliki tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang sama, yakni menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.
3. Satpol PP terdapat di seluruh kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Terdapat sumber daya yang dimiliki Satpol PP, baik sumber daya manusia dan sumber daya berupa sarana dan prasarana.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
Satpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Aspek kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan
			Internal	Eksternal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelayanan SKPD	Belum optimalnya penegakkan perda provinsi	PP Nomor 16 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018	Pemahaman anggota Satpol PP terkait perda dan pemahaman tugas pokok dan fungsi	Masyarakat kurang memahami perda	Masih tingginya jumlah pelanggaran perda
	Terjadinya pelanggaran tibumtranmas di seluruh wilayah kabupaten/kota	PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP	Anggaran, jumlah personil, kemampuan personil	Lemahnya koordinasi antar Satpol PP provinsi dengan Satpol PP kab/kota Masyarakat kurang memahami pelanggaran tibumtranmas	Tingginya jumlah pelanggaran tibumtranmas
	Belum semua Satlinmas se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan pendidikan pamswakarsa dan penanggung	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan	Petunjuk teknis pemberdayaan dan tugas Satlinmas	Keinginan masyarakat bertugas sebagai Satlinmas	Satlinmas belum mendapatkan hak pendidikan dan pelatihan dalam upaya membantu keamanan, kentruman dan ketertiban umum serta

	an bencana dan kebakaran, serta minimnya pemahaman masyarakat tentang pemadam kebakaran	masyarakat			penanggulangan bencana
--	---	------------	--	--	------------------------

3.2 Telahaan Visi, dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telahaan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, Visi dan Misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

Visi:

Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi

Terdapat 5 (lima) makna yang terkandung dari pernyataan visi tersebut, yakni

1. *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung* adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. *Sejahtera* menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat dan kesenjangan pendapatan antara masyarakat mengecil.

3. *Maju* adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).
4. *Unggul* dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung yang Unggul di bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan dukungan semua sektor.
5. *Teknologi* dimaknai tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta untuk pencapaian visis dan misi yang efisien dan cepat serta berdaya saing berbasis teknologi.

Misi:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah
2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas
3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal
4. Meningkatkan kesehatan masyarakat
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi
6. Pengelolaan bencana dan kualitas lingkungan hidup

Sebagai SKPD yang melaksanakan urusan wajib, dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat, maka misi yang disepakati terkait dengan Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah misi ke 5 (lima), yakni "*Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi*". Dukungan Satpol PP juga terjadi pada misi misi ke 6 (enam) "*Pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup*" dan misi ke 1 "*Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah*" khususnya sub sektor pariwisata, namun dukungan terhadap misi lain diintegrasikan pada level kegiatandan sub kegiatan. Tabel dibawah ini

menguraikan faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah wakil kepala daerah.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan demokrasi (5)	<p>Minimnya cakupan penegakkan perda</p> <p>Tingginya pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</p>	<p>-Koordinasi sinergitas antar lembaga yang masih lemah</p> <p>-Dukungan anggaran dan jumlah personil yang belum optimal</p> <p>-Belum optimalnya pemahaman anggota Satpol PP tentang tugas dan fungsi penegakkan perda</p>	<p>-Keinginan untuk menegakan perda dan menyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat oleh anggota Satpol PP, dan tersedianya petunjuk teknis berupa produk hukum agar aparat, masyarakat dan badan hukum dapat melaksanakan aktivitasnya dengan baik</p> <p>-Satpol PP terdapat di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>
		Belum optimalnya peran dan tugas Satlinmas dalam membantu keamanan, ketertiban umum dan ketentraman	<p>-Jumlah Satlinmas masih sedikit</p> <p>-Belum adanya pedoman/petunjuk teknis terkait tata kerja dan pelaporan Satlinmas di lapangan</p>	-Kecuali Kota Pangkalpinang Satlinmas terdapat hampir di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

		<p>masyarakat</p> <p>Belum optimalnya peran dan tugas Satlinmas membantu penanggulangan bencana dan kebakaran</p> <p>Minimnya pengetahuan masyarakat dalam rangka penanggulangan kebakaran</p>	<p>-Minimnya upaya agar satlinmas mendapatkan haknya seperti diamanatkan dalam peraturan</p> <p>Pemahaman penerapan SPM yang berbeda-beda</p>	<p>-Sub ketertiban umum, bencana dan kebakaran merupakan pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM)</p>
--	--	--	---	--

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota

Telaahan Renstra K/L dalam telaahan ini merupakan Renstra Kementerian Dalam Negeri republik Indonesia, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (BAK) yang merupakan penyusun kebijakan teknis urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sekaligus pembantu Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai pembina Satpol PP. Analisis terhadap Renstra K/L Dirjen BAK disajikan dalam tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3
 Analisis Renstra K/L
 Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan

Aspek Tinjauan	Isi Aspek Tinjauan	Analisis
Sasaran	<p>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas, dengan IKU:</p> <p>- jumlah daerah dengan indeks penyelenggaraan trantibumlinmas kategori baik</p> <p>-Indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas</p>	<p>Sebagai Pembinaan umum Satpol PP, Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Adminstrasi Kewilayahan memfasilitasi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakkan perda, dan perlindungan masyarakat</p>

Aspek Tinjauan	Isi Aspek Tinjauan	Analisis
Indikator Kinerja Program	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan trantibum - Indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat - Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas su urusan bencana - indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan kebakaran 	Dari 4 (empat) indikator program, ada 3 (tiga) indikator program yang berkaitan langsung dengan satpol pp, angka indek merupakan angka gabungan dari beberapa indikator penilaian yang berkaitan dengan pelayanan Satpol PP

Satpol PP terdapat di seluruh wilayah kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana tugas, fungsi dan kewenagannya sama dan sudah diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2018. Walaupun belum seragam, sasaran strategis dan indiokator kinerja seluruh Satpol PP tidak akan jauh dari penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakkan perda serta perlindungan masyarakat.

Tabel 3.4
Komparisasi Sasaran Renstra Satpol PP Provinsi
terhadap Sasaran Renstra Kab/Kota

No	Indikator Kinerja	Sasaran Renstra Satpol PP Kab/Kota	Sasaran Renstra Satpol PP Provinsi
1.	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2.	Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkada	Menurunnya pelanggaran perda perkada	Menurunnya pelanggaran perda/perkada

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu stragis merupakan persoalan yang dihadapi masyarakat, yang harus direspon oleh pemerintah daerah dalam hal ini organisasi perangkat daerah. Jika persoalan tersebut tidak direspon atau diantisipasi maka akan menimbulkan kerugian dan masalah besar bagi masyarakat. Berdasarkan

hasil forum diskusi di internal Satpol PP dengan memperhatikan tugas dan fungsi OPD, isu-isu strategis Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Provinsi kepulauan Bangka Belitung belum sepenuhnya merasakan tentram, tertib, teratur dan aman serta terlindungi dalam menjalankan kegiatannya. Terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, selama tahun 2017 terdapat 3.584 orang pelanggar, tahun 2018 sebanyak 2.353 orang/pelanggar dan pada tahun 2019 terdapat 975 orang/pelanggar yang diketahui di seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Kondisi kenyamanan, ketentraman, ketertiban dan keamanan juga dapat digambarkan dengan angka jumlah kriminalitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun *trendnya* menurun, terjadi tindak kriminal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selama tahun 2016 terdapat 1.828 kasus, tahun 2017 terdapat 1.490 kasus, tahun 2018 terdapat 1.477 kasus dan tahun 2019 terdapat 1.453 kasus.
3. Belum semua anggota satlinmas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan pelatihan dalam rangka membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta membantu penanganan bencana dan kebakaran. Per 31 Desember 2019 jumlah anggota satlinmas se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 3.997 orang, namun baru 1.030 orang anggota satlinmas yang telah mendapatkan pelatihan.
4. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk daerah yang sering mengalami bencana kebakaran, sepanjang tahun 2019 telah terjadi 1.565 kasus kebakaran. Saat ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki peta khusus daerah rawan kebakaran. Tidak hanya itu, kecuali anggota satlinmas, masyarakat/relawan pemadam kebakaran belum diberikan metode pemadam kebakaran.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang di hadapi. Sejalan dengan itu tujuan pelayanan jangka menengah Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah meningkatnya ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, dengan sasaran menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Tabel 4.1
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran
Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022

No.	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Capaian		Target Kinerja sasaran		
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat		Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		65,65	27,20	27	-	-
		Meningkatkan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat		Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	65,65	27,20	33	30	27
2.	Meningkatkan penegakan perda dan peraturan kepala daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	Menurunnya pelanggaran perda/perkada	-	Persentase Penurunan pelanggaran perda dan perkada	-	-	-	-	-	-

No.	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Capaian Tahun		Perk	Target Kinerja sasaran	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	2020	2018	2019	2020	2021	2022
3.	Meningkatkan jumlah satlinmas yang siap dan sigap dalam membantu penanganan bencana dan kebakaran		Meningkatkan peran satlinmas dalam membantu penanganan bencana dan kebakaran		Persentase jumlah satlinmas yang terlibat dalam membantu penanganan bencana dan kebakaran		7,63	14,94	14,94	-	-
		Meningkatkan kapasitas satlinmas dalam membantu penanganan bencana dan kebakaran		Meningkatkan satlinmas yang siap dan sigap dalam membantu penanganan bencana dan kebakaran		Persentase satlinmas yang berkualitas dalam membantu penanganan bencana dan kebakaran	7,87	14,94	14,94	-	-

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan cara lebih efektif dan efisien. Sedangkan kebijakan merupakan arah tindakan yang diambil pemerintah daerah atau organisasi perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan analisis SWOT dalam tabel 5.2 terdapat beberapa strategi Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan arah kebijakansebagai berikut:

1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, melalui pelaksanaan pengamanan, patroli, penyelenggaraan deteksi dini, gelar pasukan, serta koordinasi dan sinergitas dalam rangka penyelenggaraan tibumtranmas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - b. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara, melalui pelaksanaan penertiban terhadap pelanggar perda/perkada;
 - c. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat provinsi;
 - d. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum, melalui pelaksanaan pelatihan bagi anggota satlinmas dalam rangka membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta membantu penanganan bencanadan kebakaran;
 - e. Peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa Hak Asasi Manusia, melalui pelaksanaan pelatihan dan pengiriman peserta peningkatan kapasitas anggotasatpolpp;
 - f. Pembinaan jabatan fungsional satuan polisi pamong praja;
 - g. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum, melalui pengadaan sapsras yang dibutuhkan dalam menjalankan kewenangan dan tugas;

2. Penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur
 - b. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan gubernur, melalui pelaksanaan penindakan pelanggaran perda/perkada secara non yustisial dan pengawasan/razia ASN;
 - c. Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur, melalui pelaksanaan penindakan yustisial melalui penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda/perkada.
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dengan arah kebijakan pengembangan kapasitas dan karier PPNS, melalui pelatihan bimtek pengembangan kapasitas anggota PPNS;
4. Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan dan pemuktahiran informasi daerah rawan kebakaran dan petarawan kebakaran;
 - b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - c. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan kebakaran.

Tabel 5.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

VISI : Babel sejahtera, provinsi maju yang unggul dibidang inovasi agropolitan dan bahari dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat berbasis teknologi"									
MISI (5) : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi									
Tujuan		Sasaran		Strategi	Kebijakan				
Lama	Baru	Lama	Baru		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	Meningkatkan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1) Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di tingkat kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi 2) Penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur 3) Pembinaan Penyidik Pegawai	- Peningkatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melalui pelaksanaan pengamatan, patroli, deteksi dini,	- Peningkatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melalui pelaksanaan pengamatan, patroli, deteksi dini,	- Peningkatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melalui pelaksanaan pengamatan, patroli, deteksi dini,	- Pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat - Penindakan atas gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan perda - Koordinasi	- Pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat - Penindakan atas gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan perda

				<p>Negeri Sipil (PPNS)</p> <p>4) Penyelenggaraan pemetaan rawan bencanakebakaran</p>	<p>gelar pasukan koordinasi dan sinergitas dalam rangka penyelenggaraan tibumtranas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p> <p>- Peningkatan kapasitas penyelenggaraan kantrantibmas, pengaman pemilu/ pemiluk ada bagi satlinmas serta melakukan sosialisasi peraturan terkait penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada pihak terkait.</p> <p>- Peningkatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan kapasitas anggota Satpol PP serta penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional</p>	<p>gelar pasukan koordinasi dan sinergitas dalam rangka penyelenggaraan tibumtranas di Kepulauan Bangka Belitung.</p> <p>- Peningkatan kapasitas penyelenggaraan kantrantibmas, pengaman pemilu/ pemiluk ada bagi satlinmas serta melakukan sosialisasi peraturan terkait penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada pihak terkait.</p> <p>- Peningkatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan kapasitas anggota Satpol PP serta penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional</p>	<p>gelar pasukan koordinasi dan sinergitas dalam rangka penyelenggaraan tibumtranas di Kepulauan Bangka Belitung.</p> <p>- Peningkatan kapasitas penyelenggaraan kantrantibmas, pengaman pemilu/ pemiluk ada bagi satlinmas serta melakukan sosialisasi peraturan terkait penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada pihak terkait.</p> <p>- Peningkatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan kapasitas anggota Satpol PP serta penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional</p>	<p>enyelenggara ketertarikan mandanketerampilan tingkatprovinsi</p> <p>- Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketertarikan dan ketertiban umum</p> <p>- Peningkatan kapasitas SDM satuanpolisi pamongprajadansatuan perlindungan masyarakat kattermasuk dalampelaksanaan tugas bernuasa Hak Asasi Manusia</p> <p>- Pembinaan jabatan fungsional satuan polisi pamongpraja</p> <p>- Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketertarikan dan ketertiban umum</p> <p>- Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan gubernur</p>	<p>-Koordinasi penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum tingkat provinsi</p> <p>- Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketertarikan dan ketertiban umum</p> <p>- Peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas bernuasa Hak Asasi Manusia</p> <p>- Pembinaan jabatan fungsional satuan polisi pamong praja</p> <p>-Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketertarikan dan ketertiban umum</p> <p>-Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur</p>
--	--	--	--	--	--	---	---	--	---

					<p>al polisi pamong praja.</p> <p>- Peningkatan penindakan non yustisial dan yustisial terhadap warga masyarakat, aparat, dan badan hukum yang melanggar perda/peerkada, peningkatan pemberdayaan peran dan tugas PPNS, serta peningkatan koordinasi dan sinergitas dalam rangka penegakan perda dan perkada</p>	<p>al polisi pamong praja.</p> <p>- Peningkatan penindakan non yustisial dan yustisial terhadap warga masyarakat, aparat, dan badan hukum yang melanggar perda/peerkada, pemberdayaan peran dan tugas PPNS, serta peningkatan koordinasi dan sinergitas dalam rangka penegakan perda dan perkada</p>	<p>al polisi pamong praja.</p> <p>- Peningkatan penindakan non yustisial dan yustisial terhadap warga masyarakat, aparat, dan badan hukum yang melanggar perda/peerkada, pemberdayaan peran dan tugas PPNS, serta peningkatan koordinasi dan sinergitas dalam rangka penegakan perda dan perkada</p>	<p>- Penanganan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur</p> <p>- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;</p> <p>- Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan kebakaran.</p>	<p>- Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan gubernur</p> <p>- Penanganan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur</p> <p>- Pengembangan kapasitas dan karier PPNS</p> <p>- Penyediaan dan pemuktahiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran;</p> <p>- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;</p> <p>-Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan kebakaran.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Tabel 5.2
Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Acaman (SWOT)

<u>Internal dan Eksternal</u>	<u>KEKUATAN (S)</u>	<u>KELEMAHAN (W)</u>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuatnya dasar hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja 2. Adanya kemauan dan komitmen jajaran Satpol PP dalam rangka pelaksanaan tugas 3. Keberadaan perda dan perkara sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan tibumtranmas dan penegakkan perda 4. Keberadaan PPNS di Satpol PP dan OPD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai (kualitas dan kuantitas) 2. Belum semua anggota Satpol PP memahami teknis operasional satpol pp dalam penyelenggaraan tibumtranmas dan penegakkan perda 3. Belum semua satlinmas mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam rangka membantu penyelenggaraan tibumtranmas, penanganan bencana dan kebakaran 4. Minimnya penyidikan kasus oleh Satpol PP yang sampai di pengadilan
<u>PELUANG (O)</u>	<u>Strategi (S-O)</u>	<u>Strategi (W-O)</u>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan masyarakat akan kondisi hidup yang tertib, tentram, aman dan terlindungi dari bencana 2. Kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan peran dan tugas Satpol PP 3. Peraturan yang mengamanatkan Satpol PP dapat bekerjasama dan penegak hukum seperti Kepolisian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, melalui arah kebijakan: <ol style="list-style-type: none"> a) Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara, melalui pelaksanaan penertiban 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, melalui arah kebijakan: <ol style="list-style-type: none"> a) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum, melalui pelaksanaan pelatihan bagi anggota satlinmas dalam rangka membantu

<p>dan TNI</p>	<p>terhadap pelanggar perda/perkada;</p> <p>b) Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat provinsi;</p> <p>c) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum, melalui pelaksanaan pelatihan bagi anggota satlinmas dalam rangka membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta membantu penanganan bencana dan kebakaran;</p> <p>d) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum, melalui pengadaan sapras yang dibutuhkan dalam menjalankan kewenangan dan tugas;</p>	<p>penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta membantu penanganan bencana dan kebakaran,</p> <p>b) Peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa Hak Asasi Manusia, melalui pelaksanaan pelatihan dan pengiriman peserta peningkatan kapasitas anggota satpol pp;</p> <p>c) Pembinaan jabatan fungsional satuan polisi pamong praja;</p> <p>2. Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran</p>
<p><u>TANTANGAN (T)</u></p> <p>1. Kurangnya pemahaman masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap peraturan perundang-undangan</p>	<p>Strategi (S-T)</p> <p>Penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur</p>	<p>Strategi (W-T)</p> <p>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</p>

<p>daerah</p> <p>2. Tuntutan terhadap pelayanan Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakkan perda/perkada</p> <p>3. Luasnya cakupan wilayah/ wilayah kepulauan</p> <p>4. Kebebasan berpendapat, yang menjamin masyarakat untuk menyuarakan pendapat melalui demonstrasi/unjuk rasa</p>		
--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi nSKPD, dengan memperhatikan tujuan dan sasaran. Program dan kegiatan yang telah disusun juga telah disesuaikan dengan program bidang kesatuan politik dalam negeri yang terdapat pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan dalam tabel 6.1 dan tabel 6.2 dibawah ini.

PAGU INDIKATIF
OPD: SATPOL PP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PROGRAM, KEGIATAN, INDIKASI, ANGGARAN

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
				2018		2019		2020		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	-	100%	7,716,306,300	100%	13,161,014,600	100%	7,883,656,100	100%
		Peringkat SAKIP perangkat daerah		B		B		B		B
1.01	Pelayanan administrasi perkantoran (ATK, bahan bacaan, gaji non PNS, perjalanan dinas, makanan tambahan dan lain-lain)	Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani selama 12 bulan	-	100%	6,224,892,200	100%	6,234,242,000	100%	6,234,242,000	100%
1.02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana dan prasarana perkantoran selama 12 bulan	-	203 orang	1,053,022,000	203 orang (ada DED dan gedung kantor jika 2018 tidak terealisasi)	6,571,260,000	203 orang	1,203,022,000	203 orang
1.03	Peningkatan disiplin aparatur	Jumlah pakaian dinas dan atributnya dan mesin absensi	-	408 buah (74 PDH, 129 PDL, 203 sepatu dan 2 mesin sidik jari)	212,379,500	34 stel (PSR dan PSL)	129,500,000	408 buah (74 PDH, 129 PDL, 203 sepatu dan 1 mesin sidik jari)	220,379,500	0
1.04	Peningkatan sumber daya aparatur	Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat kapasitasnya	-	65 orang	35,503,100	65 orang	35,503,100	65 orang	35,503,100	65 orang
1.05	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah	-	2 dokumen	80,949,500	2 dokumen	80,949,500	2 dokumen	80,949,500	2 dokumen
1.06	Penyusunan laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	-	6 dokumen/laporan	109,560,000	6 dokumen/laporan	109,560,000	6 dokumen/laporan	109,560,000	6 dokumen/laporan

1			
2021	2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
Rp (16)	Target (17)	Rp (18)	Target (15)
7,663,276,600	100%	7,867,656,100	100
	B		
6,234,242,000	100%	6,234,242,000	5
1,203,022,000	203 orang	1,203,022,000	#VALUE!
	0 408 buah (74 PDH, 129 PDL, 203 sepatu	204,379,500	#VALUE!
35,503,100	65 orang	35,503,100	#VALUE!
80,949,500	2 dokumen	80,949,500	#VALUE!
109,560,000	6 dokumen/ laporan	109,560,000	#VALUE!

PAGU INDIKATIF
OPD: SATPOL PP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PROGRAM, KEGIATAN, INDIKASI, ANGGARAN

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
				2018		2019		2020		2021
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	-	100%	7,716,306,300	100%	13,161,014,600	100%	7,883,656,100	100%
		Peringkat SAKIP perangkat daerah		B		B		B		B
1.01	Pelayanan administrasi perkantoran (ATK, bahan bacaan, gaji non PNS, perjalanan dinas, makanan tambahan dan lain-lain)	Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani selama 12 bulan	-	100%	6,224,892,200	100%	6,234,242,000	100%	6,234,242,000	100%
1.02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana dan prasarana perkantoran selama 12 bulan	-	203 orang	1,053,022,000	203 orang (ada DED dan gedung kantor jika 2018 tidak terealisasi)	6,571,260,000	203 orang	1,203,022,000	203 orang
1.03	Peningkatan disiplin aparatur	Jumlah pakaian dinas dan atributnya dan mesin absensi	-	408 buah (74 PDH, 129 PDL, 203 sepatu dan 2 mesin sidik jari)	212,379,500	34 stel (PSR dan PSL)	129,500,000	408 buah (74 PDH, 129 PDL, 203 sepatu dan 1 mesin sidik jari)	220,379,500	0
1.04	Peningkatan sumber daya aparatur	Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat kapasitasnya	-	65 orang	35,503,100	65 orang	35,503,100	65 orang	35,503,100	65 orang
1.05	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah	-	2 dokumen	80,949,500	2 dokumen	80,949,500	2 dokumen	80,949,500	2 dokumen
1.06	Penyusunan laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	-	6 dokumen/laporan	109,560,000	6 dokumen/laporan	109,560,000	6 dokumen/laporan	109,560,000	6 dokumen/laporan

021	2022	
Rp (16)	Target (17)	Rp (18)
7,663,276,600	100%	7,867,656,100
	B	
6,234,242,000	100%	6,234,242,000
1,203,022,000	203 orang	1,203,022,000
	0 408 buah (74 PDH, 129 PDL, 203 sepatu	204,379,500
35,503,100	65 orang	35,503,100
80,949,500	2 dokumen	80,949,500
109,560,000	6 dokumen/laporan	109,560,000

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
							Kinerja	Rp.	2019		2020		2021		2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
	Lama		Baru	Lama	Baru			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan			Tingkat kepuasan aparaturnya perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan		100%	100%	5,544,752,713	7,327,274,300	100%	100%	9,330,647,200					22,202,674,213	Sekretariat	Pangkalpinang
				Peringkat SAKIP perangkat daerah	B	BB	82,803,100									BB	82,803,100	Sekretariat	Pangkalpinang
				Nilai SAKIP perangkat daerah	63.38			69.00	179,560,000	72.00	209,560,000					78.00	389,120,000	Sekretariat	Pangkalpinang
1.01	Pelayanan administrasi perkantoran (ATK, bahan bacaan, gaji non PNS, perjalanan dinas, makanan tambahan dan lain-lain)			Jumlah aparaturnya perangkat daerah yang terlayani selama 12 bulan	203 orang	203 orang	4,642,298,313	203 orang	5,465,543,300	233 orang	7,753,078,200					233 orang	17,860,919,813	Sekretariat	Pangkalpinang
1.02	Peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya			Jumlah aparaturnya perangkat daerah yang memanfaatkan sarana dan prasarana perkantoran selama 12 bulan	203 orang	203 orang	637,348,200	203 orang	1,179,549,000	233 orang	1,336,009,000					233 orang	3,152,906,200	Sekretariat	Pangkalpinang
1.03	Peningkatan disiplin aparaturnya			Jumlah aparaturnya yang meningkat disiplinnya	203 orang	203 orang	182,303,100	203 orang	407,920,000	17 orang	32,000,000					233 orang	622,223,100	Sekretariat	Pangkalpinang
1.04	Peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya			Jumlah aparaturnya perangkat daerah yang mempunyai kompetensi	0	-	0	65 orang	94,702,000	-	0					65 orang	94,702,000	Sekretariat	Pangkalpinang
1.05	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan			Jumlah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah	3 dokumen	2 dokumen	0	-	0	-	0					2 dokumen	0	Sekretariat	Pangkalpinang
		Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan		Jumlah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah	3 dokumen	2 dokumen	42,123,800	2 dokumen	70,000,000	2 dokumen	100,000,000					10 dokumen	212,123,800	Sekretariat	Pangkalpinang
1.06	Penyusunan laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	5 dokumen/laporan	6 dokumen/laporan	40,679,300	6 dokumen/laporan	109,560,000	6 dokumen/laporan	109,560,000					30 dokumen/laporan	259,799,300	Sekretariat	Pangkalpinang
1.05.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Nilai saki perangkat daerah	78							78	141,091,000	80	141,091,000	80	282,182,000	Sekretariat	Pangkalpinang
				Survei kepuasan pelayanan internal	80							90%	12,925,704,391	95%	12,659,948,000	95%	25,585,652,391	Sekretariat	Pangkalpinang
												13,066,795,391		12,801,039,000		25,867,834,391			
1.05.01.01		Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	14 dokumen							7 dokumen	141,091,000	7 dokumen	141,091,000	14 dokumen	282,182,000	Sekretariat	Pangkalpinang
1.05.01.1.01.01		Penyusunan renstra dan renja perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan Renstra/Renja PD	5 dokumen							2 dokumen	60,000,000	2 dokumen	60,000,000	4 dokumen	120,000,000	Sekretariat	Pangkalpinang
1.05.01.1.01.03		Penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah		Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi PD	8 dokumen							4 dokumen	15,000,000	4 dokumen	15,000,000	8 dokumen	30,000,000	Sekretariat	Pangkalpinang
1.05.01.1.01.04		Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah		Jumlah kesepakatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	2 dokumen							1 dokumen	35,000,000	1 dokumen	35,000,000	2 dokumen	70,000,000	Sekretariat	Pangkalpinang
1.05.01.1.01.05		Evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD (LKPJ, LAKIP, LPPD dan Data Sektoral)	8 dokumen							4 dokumen	31,091,000	4 dokumen	31,091,000	8 dokumen	62,182,000	Sekretariat	Pangkalpinang
1.05.01.1.02		Administrasi keuangan		Survei kepuasan pelayanan keuangan	75%							80%	10,784,856,391	92%	10,834,000,000	92%	21,618,856,391	Sekretariat	Pangkalpinang
1.05.01.1.02.01		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan	78 orang							78 orang	10,752,856,391	78 orang	10,800,000,000	156 orang	21,552,856,391	Sekretariat	Pangkalpinang

1.05.01.1.02.07		Penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran	-	Jumlah laporan keuangan bulanan semesteran	8 dokumen						4 laporan	22,000,000	4 laporan	24,000,000	8 laporan	46,000,000	Sekretariat	Pangkalpinang
1.05.01.1.02.09		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	2 dokumen						1 laporan	10,000,000	1 laporan	10,000,000	2 laporan	20,000,000	Sekretariat	Pangkalpinang
1.05.01.1.03		Administrasi umum	-	Survei kepuasan pelayanan umum	85%						90%	1,849,848,000	95%	1,711,448,000	95%	3,561,296,000	Sekretariat	Pangkalpinang
1.05.01.1.03.01		Penyediaan jasa surat menyurat	-	Jumlah barang yang dikirim							12 barang	1,200,000	12 barang	1,200,000	24 barang	2,400,000	Sekretariat	Pangkalpinang
			-	Jumlah materai	1200 lembar						600 lembar	2,400,000	600 lembar	2,400,000	1200 lembar	4,800,000	Sekretariat	Pangkalpinang
			-	Jumlah surat yang dikirim	-						120 surat	2,850,000	120 surat	2,850,000	240 surat	5,700,000	Sekretariat	Pangkalpinang
1.05.01.1.03.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	Tagihan rekening listrik, air, telpon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	24 bulan						12 bulan	113,800,000	12 bulan	133,800,000	24 bulan	247,600,000	Sekretariat	Pangkalpinang
1.05.01.1.03.06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perintan kendaraan dinas/operasional	-	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara						24 unit	17,050,000	24 unit	17,050,000	48 unit	34,100,000	Sekretariat	Pangkalpinang
1.05.01.1.03.07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	Jumlah pengelola administrasi keuangan	20 orang						10 orang	90,000,000	10 orang	90,000,000	20 orang	180,000,000	Sekretariat	Pangkalpinang
1.05.01.1.03.08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan							3 orang	95,700,000	3 orang	95,700,000	6 orang	191,400,000	Sekretariat	Pangkalpinang
			-	Jumlah jenis bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia	2 paket						10 jenis	9,000,000	10 jenis	9,000,000	20 jenis	18,000,000	Sekretariat	Pangkalpinang
1.05.01.1.03.10		Penyediaan alat tulis kantor	-	Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli	2 paket						15 jenis	110,000,000	15 jenis	120,000,000	30 jenis	230,000,000	Sekretariat	Pangkalpinang
1.05.01.1.03.11		Penyediaan cetak dan penggandaan	-	Jumlah barang cetak	2 paket						10 eksemplar	5,000,000	10 eksemplar	5,000,000	20 eksempla	10,000,000	Sekretariat	Pangkalpinang
			-	Jumlah penggandaan	7200 lembar						36000 lembar	10,800,000	36000 lembar	10,800,000	7200 lembar	21,600,000	Sekretariat	Pangkalpinang
			-	Jumlah cetak spanduk dan umbul umbul	12 meter						12 meter	528,000	12 meter	528,000	24 meter	1,056,000	Sekretariat	Pangkalpinang
			-	Jumlah cetak umbul umbul	30 buah						30 buah	1,320,000	30 buah	1,320,000	60 buah	2,640,000	Sekretariat	Pangkalpinang
1.05.01.1.03.12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	1 paket						10 jenis	10,000,000	10 jenis	10,000,000	20 jenis	20,000,000	Sekretariat	Pangkalpinang
1.05.01.1.03.13		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	-						7 unit	45,150,000	5 jenis	40,000,000	12 jenis	85,150,000	Sekretariat	Pangkalpinang
1.05.01.1.03.15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	7920 eksemplar						3960 eksemplar	16,560,000	3960 eksemplar	16,560,000	7920 eksemplar	33,120,000	Sekretariat	Pangkalpinang
1.05.01.1.03.16		Penyediaan bahan logistik kantor	-	jumlah bahan logistik kantor yang tersedia (galon dan isi ulang elpiji)	16 kali						1448 unit	19,440,000	1448 unit	19,440,000	2896 unit	38,880,000	Sekretariat	Pangkalpinang
1.05.01.1.03.17		Penyediaan makan dan minum	-	Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	24 bulan						480 pax	35,000,000	480 pax	35,000,000	960 pax	70,000,000	Sekretariat	Pangkalpinang
			-	Jumlah makan dan minum tamu tersedia	24 bulan						480 pax	48,000,000	480 pax	48,000,000	960 pax	96,000,000	Sekretariat	Pangkalpinang
1.05.01.1.03.18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	-	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	24 bulan						20 kali	250,000,000	20 kali	250,000,000	40 kali	500,000,000	Sekretariat	Pangkalpinang
			-	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dilaksanakan							30 kali	200,000,000	30 kali	200,000,000	60 kali	400,000,000	Sekretariat	Pangkalpinang
1.05.01.1.03.26		Pengadaan meubelair	-	Jumlah meubelair yang diadakan	-						-	0	2 jenis	6,750,000	2 jenis	6,750,000	Sekretariat	Pangkalpinang
1.05.01.1.03.29		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit						1 unit	25,000,000	1 unit	50,000,000	2 unit	75,000,000	Sekretariat	Pangkalpinang

				Jumlah tenaga sopir yang dipekerjakan								9 orang	287,100,000	9 orang	287,100,000	18 orang	574,200,000	Sekretariat	Pangkalpinang
1.05.01.1.03.31		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	23 kendaraan							24 unit	232,950,000	30 unit	232,950,000	54 unit	465,900,000	Sekretariat	Pangkalpinang
1.05.01.1.03.33		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	1 paket							10 unit	13,000,000	10 unit	13,000,000	20 unit	26,000,000	Sekretariat	Pangkalpinang
1.05.01.1.03.35		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 paket							13 unit	13,000,000	13 unit	13,000,000	26 unit	26,000,000	Sekretariat	Pangkalpinang
1.05.01.1.03.39		Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	-	Jumlah gedung kantor yang direhab	-							1 unit pagar	195,000,000	-	0	1 unit pagar	195,000,000	Sekretariat	Pangkalpinang
1.05.01.1.04		Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya manusia	-	Survei kepuasan pelayanan kepegawaian	80%							85%	291,000,000	92%	114,500,000	92%	405,500,000	Sekretariat	Pangkalpinang
1.05.01.1.04.02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	Jumlah pakaian dinas	13 stel							20 stel (PDH Pol Par)	15,000,000	-	0	20 stel (PDH Pol Par)	15,000,000	Sekretariat	Pangkalpinang
1.05.01.1.04.03		Pengadaan pakaian kerja lapangan	-	Jumlah pakaian lapangan	377 stel							230 stel (PDL)	276,000,000	-	0	229 stel (PDL)	276,000,000	Sekretariat	Pangkalpinang
1.05.01.1.04.05		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	-							-	0	229 stel (pakaian olahraga)	114,500,000	299 stel (pakaian olahraga)	114,500,000	Sekretariat	Pangkalpinang
01	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat			Persentase penindakan pelanggaran tumbutanmas		100%	1,781,400,800	100%	1,498,447,500	100%	2,549,804,500					100%	5,829,652,800	Tibumtranmas	Provinsi Kep. Babel
1.01	Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat			Jumlah bulan penyelenggaraan tumbutanmas Satpol PP (penertiban, pengamanan, dan pengawalan)	12 bulan	12 bulan	1,657,496,300	12 bulan	1,123,250,000	-	0					24 bulan	2,780,746,300	Tibumtranmas	Provinsi Kep. Babel
				Jumlah penyelenggaraan tumbutanmas satpol pp						467 kali	2,200,000,000					1401 kali	2,200,000,000	Tibumtranmas	Provinsi Kep. Babel
1.02	Patroli			Jumlah patroli	12 bulan	1080 kali	-	1080 kali	125,900,000	1080 kali	125,900,000					4320 kali	251,800,000	Tibumtranmas	Provinsi Kep. Babel
1.03	Gelar pasukan dalam rangka penyelenggaraan tumbutanmas dan linmas serta kesiapsiagaan tim pemadam kebakaran			Jumlah peserta gelar pasukan	750 orang	600 orang	123,904,500	800 orang	149,297,500	600 orang	123,904,500					3200 orang	397,106,500	Tibumtranmas	Pangkalpinang
1.04	Penyelenggaraan deteksi dini pelanggaran tumbutanmas			Jumlah kegiatan rapat	0	-	0	-	0	-	0					-	0	Tibumtranmas	Pangkalpinang
				Jumlah deteksi dini pelanggaran tumbutanmas	0	0	0	12 kali	100,000,000	12 kali	100,000,000					48 kali	200,000,000	Tibumtranmas	Provinsi Kep. Babel
02	Program Penegakkan Perda dan Perkada			Cakupan penegakkan perda		83.78%	100.00%	95,833,500	100%	625,661,500	100%	394,157,191				100%	1,115,652,191	Penegakkan Perda dan Perkada	Provinsi Kep. Babel
2.01	Pembinaan dan penindakan non yustisial terhadap pelanggar perda dan perkada	-	-	Jumlah warga, aparatur, badan hukum yang ditindak secara non yustisial	1000 orang tahun 2016	242 orang	52,665,000	352 orang	261,811,500	252 orang	59,145,391					1550 orang	373,621,891	Penegakkan Perda dan Perkada	Provinsi Kep. Babel
2.02	Penindakan yustisial terhadap pelanggar perda dan perkada	-	-	Jumlah penyelidikan dan penyidikan (pemberkasas)	15 kali penyelidikan dari tahun 2016 sd. bulan Agustus 2017	10 kali penyelidikan dan 1 penyidikan	27,728,500	10 penyelidikan dan 2 penyidikan	141,657,000	10 penyelidikan dan 3 penyidikan	235,524,800					50 penyelidikan dan 12 penyidikan	404,910,300	Penegakkan Perda dan Perkada	Provinsi Kep. Babel
2.03	Penatakelolaan sekretariat PPNS Provinsi Kep. Babel	-	-	Jumlah koordinasi penyidikan, pemeriksana dan penertiban Satpol PP	7 kali kegiatan pada tahun 2016	1 kali kegiatan rapat	3,747,500	10 kali kegiatan rapat	41,120,000	10 kali kegiatan rapat	41,120,000					41 kali kegiatan rapat	85,987,500	Penegakkan Perda dan Perkada	Pangkalpinang
2.04	Pemberdayaan peran dan tugas PTI Satpol PP Provinsi Kep. Babel			Jumlah dokumen pendisiplinan internal anggota Satpol PP	12 bulan	12 bulan	11,692,500	-	0	-	0					12 bulan	11,692,500	Penegakkan Perda dan Perkada	Pangkalpinang

		Pemberdayaan peran dan tugas PTI (Petugas Tindak Internal)		Jumlah anggota yang melanggar disiplin dan ditindak	-	-	0	10 orang	100,000,000	-	0				10 orang	100,000,000	Penegakkan Perda dan Perkada	Pangkalpinang
2.05	Bimtek pemberkasan PPNS penegak perda se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Jumlah PPNS yang mengikuti kegiatan	0	0	0	20 orang PPNS	22,706,000	-	0					45 orang PPNS	22,706,000	Penegakkan Perda dan Perkada	Pangkalpinang
2.06	Rapat koordinasi Satpol PP se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PPNS dilingkungan Pemprov Kep. Babel		Jumlah peserta rakor satpol pp dengan PPNS	40 orang tahun 2017	0	0	30 orang	58,367,000	30 orang	58,367,000					120 orang	116,734,000	Penegakkan Perda dan Perkada	Pangkalpinang
03	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat		Persentase peningkatan kualitas linmas dalam penyelenggaraan kanrantibmas	7.71%	1.51%	85,907,220	85,907,220	5.74%	463,605,000	2.72%	1,409,802,000	755,987,000			23.12%	1,305,499,220	Linmas	Provinsi Kep. Babel
3.01	Pembinaan dan penyelenggaraan kanrantibmas bagi Satlinmas se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	Jumlah peserta satlinmas	340 orang dari tahun 2015	50 orang satlinmas	85,907,220	-	-	0	-	0				50 orang satlinmas	0	Linmas	Provinsi Kep. Babel
3.02	Penyelenggaraan peningkatan kapasitas anggota Satuan Perlindungan Masyarakat se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Jumlah peserta satlinmas	340 orang dari tahun 2015	-	0	-	0	-	0					-	0	Linmas	Pangkalpinang
3.03			Jumlah peserta satlinmas dalam penyelenggaraan kanrantibmas		50 orang satlinmas	85,907,220	60 orang satlinmas	227,529,000	60 orang satlinmas	227,529,000					360 orang satlinmas	455,058,000	Linmas	Pangkalpinang
	Bimtek pengamanan pemilu dan pemilukada bagi Satlinmas se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	Jumlah peserta satlinmas	170 orang	-	0	-	0	-	0					-	0	Linmas	Pangkalpinang
			Jumlah peserta satlinmas yang mampu mengamankan pemilu dan pemilukada		-	0	100 orang satlinmas	236,076,000	-	0					300 orang satlinmas	236,076,000	Linmas	Pangkalpinang
3.04	Jambore Satlinmas se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	Jumlah peserta satlinmas	0	-	0	-	0	-	0					-	0	Linmas	Pangkalpinang
			Jumlah peserta satlinmas dalam kegiatan jambore	0	-	0	-	0	198 orang satlinmas	528,458,000					396 orang satlinmas	528,458,000	Linmas	Pangkalpinang
3.05	Sosialisasi Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat		Jumlah peserta sosialisasi	-	-	0	-	-	-	0					-	0	Linmas	Pangkalpinang
			Jumlah peserta sosialisasi peraturan terkait penyelenggaraan perlindungan masyarakat		-	0	-	-	-	-					25 orang	0	Linmas	Pangkalpinang
			Persentase peningkatan kualitas linmas dalam penanganan bencana dan kebakaran	6.05%	-	0	6.05%	522,370,000	-	-					12.10%	0	Linmas	Provinsi Kep. Babel
			Persentase satlinmas yang terlatih dalam penanganan bencana dan kebakaran	6.05%	-	0	-	-	6.05%	653,815,000					30.25%	653,815,000	Linmas	Provinsi Kep. Babel
3.06	Pendidikan dan pelatihan bencana dan kebakaran bagi Satlinmas		Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan bencana dan kebakaran bagi satlinmas	200 orang dari tahun 2015	-	0	100 orang satlinmas	220,000,000	200 orang satlinmas	386,000,000					700 orang satlinmas	606,000,000	Linmas	Provinsi Kep. Babel
3.07	Tanggap darurat pengurangan resiko bencana dan kebakaran (Satpol PP)		Jumlah bulan tanggap darurat	-	-	0	-	0	-	0					-	0	Linmas	Provinsi Kep. Babel

			Pengurangan resiko bencana dan kebakaran	Jumlah ketanggapan dalam membantu pengurangan resiko bencana dan kebakaran	-			12 kali	302,370,000	12 kali	138,605,000				48 kali	440,975,000	Linmas	Provinsi Kep. Babel
				Jumlah dokumen peta rawan kebakaran	0 dokumen			1 dokumen							1 dokumen		Linmas	Provinsi Kep. Babel
3.08			Simulasi akbar pemadam kebakaran	Jumlah simulasi pemadam kebakaran	-	-	0	-	0						0		Linmas	Pangkalpinang
				Jumlah peserta simulasi						350 orang	129,210,000				1050 orang	129,210,000	Linmas	Pangkalpinang
04			Program Pembinaan dan Pengembangan Personil Satpol PP	Persentase pembinaan dan pengembangan personil Satpol PP	32.46%	1.95%	241,838,101	16.23%	814,796,000	16.23%	790,937,000				99.00%	1,847,571,101	Peningkatan Personil	Pangkalpinang
4.01			Pembinaan peningkatan personil bagi satuan Polisi Pamong Praja (<i>pembinaan mental, beladiri dan senam, pelatihan penanganan urjuk rasa, kesemaptaan dan instruktur upacara</i>)	Jumlah peserta yang mengikuti diklat, bimtek, pelatihan dan pembinaan	1991 orang kali	880 orang	181,916,000	740 orang kali	200,000,000	740 orang kali	200,000,000				3840 orang		Peningkatan Personil	Pangkalpinang
4.02			Pengiriman peserta bimtek dan diklat peningkatan kompetensi aparatur	Jumlah peserta yang terfasilitasi mengikuti bimtek dan diklat	25 orang	7 orang	59,922,101	25 orang	250,000,000	25 orang	440,937,000				107 orang	750,859,101	Peningkatan Personil	Indonesia
4.03			Pendidikan dan pelatihan dasar polisi pamong praja	Jumlah peserta	52 tahun 2017	-	0	-	0	-	0				0	0	Peningkatan Personil	Pangkalpinang
				Jumlah peserta diklat dasar pol pp		-		0	30 orang		214,796,000				30 orang	214,796,000	Peningkatan Personil	Pangkalpinang
4.04			Pembinaan jabatan fungsional polisi pamong praja	Jumlah peserta	-	-	0	-	0	-	0				-	0	Peningkatan Personil	Pangkalpinang
				Jumlah pejabat fungsional yang dibina	-	-	0	50 orang	150,000,000	50 orang	150,000,000				70 orang	300,000,000	Peningkatan Personil	Pangkalpinang
1.05.02			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran tibumtranmas yang ditindak	100%					100%	8,416,389,000	100%	8,469,689,000	100%	16,886,078,000	Tibumtranmas	Prov. Kep. Babel	
				Persentase penegakan pelanggaran perda	100%					100%	300,000,000	100%	380,000,000	100%	680,000,000	Penegakan Perda/Perkada	Prov. Kep. Babel	
				Persentase satlinmas yang terlatih dalam penyelenggaraan kantrantibmas dan membantu penanganan bencana dan kebakaran	28.06%					44.78%	430,000,000	55.07%	310,000,000	55.07%	740,000,000	Linmas	Prov. Kep. Babel	
				Persentase personil satpol pp yang berkompeten	86.66%					89.33%	300,500,000	93.33%	300,500,000	93.33%	601,000,000	Personil	Prov. Kep. Babel	
											9,446,889,000		9,460,189,000		18,907,078,000			
1.05.02.1.01			Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat							1548 kali	9,146,889,000	1548 kali	9,080,189,000	3096 kali	18,227,078,000	Tibumtranmas	Prov. Kep. Babel
1.05.02.1.01.01			Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah pengawasan							30 kali	65,000,000	30 kali	65,000,000	60 kali	130,000,000	Tibumtranmas	Prov. Kep. Babel
				Jumlah pengamanan demo							24 kali	28,600,000	24 kali	28,600,000	48 kali	57,200,000	Tibumtranmas	Pangkalpinang
				Jumlah pengamanan aset/piket							360 hari	2,843,452,000	360 hari	2,843,452,000	720 hari	5,686,904,000	Tibumtranmas	Prov. Kep. Babel
				Jumlah deteksi dini pelanggaran tibumtranmas							1080 kali	70,000,000	1080 kali	70,000,000	2160 kali	140,000,000	Tibumtranmas	Prov. Kep. Babel
				Jumlah patroli							12 kali	60,000,000	12 kali	60,000,000	24 kali	120,000,000	Tibumtranmas	Prov. Kep. Babel
				Jumlah peserta gelar pasukan							600 orang	101,137,000	600 orang	101,137,000	1200 orang	202,274,000	Tibumtranmas	Pangkalpinang

1.05.02 .1.01.0 2		Penindakan atas gangguan ketertarikan dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada	Jumlah penertiban pelanggaran ketertarikan dan ketertiban umum							20 kali	5,036,500,000	20 kali	5,036,500,000	40 kali	10,073,000,000	Tibumtranmas	Prov. Kep. Babel
1.05.02 .1.01.0 3		Koordinasi penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum tingkat provinsi	Jumlah kegiatan rakor							2 kali	75,600,000	2 kali	75,600,000	4 kali	151,200,000	Tibumtranmas	Pangkalpinang
1.05.02 .1.01.0 4		Pemberdayaan masyarakat dalam rangka ketertarikan dan ketertiban umum	Jumlah peserta satlinmas dalam penyelenggaraan kantranitimas							50 orang satlinmas	180,000,000	50 orang satlinmas	180,000,000	100 orang satlinmas	360,000,000	Linmas	Prov. Kep. Babel
			Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan bencana dan kebakaran bagi satlinmas							100 orang satlinmas	130,000,000	100 orang satlinmas	130,000,000	200 orang satlinmas	260,000,000	Linmas	Prov. Kep. Babel
			Jumlah peserta satlinmas yang mampu mengamankan pemilu dan pemilu							80 orang satlinmas	120,000,000	-	-	0 80 orang satlinmas	120,000,000	Linmas	Pangkalpinang
1.05.02 .1.01.0 5		Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa Hak Asasi Manusia (HAM)	Jumlah peserta pembinaan mental dan spritual							200 orang	22,000,000	200 orang	22,000,000	400 orang	44,000,000	Personil	Pangkalpinang
			Jumlah latihan fisik							22 kali	37,000,000	22 kali	37,000,000	44 kali	74,000,000	Personil	Pangkalpinang
			Jumlah peserta pelatihan pelaksanaan tugas pol pp							50 orang	20,000,000	50 orang	20,000,000	100 orang	40,000,000	Personil	Pangkalpinang
			Jumlah pelatihan instruktur upacara							48 kali	24,750,000	48 kali	24,750,000	96 kali	49,500,000	Personil	Pangkalpinang
			Jumlah peserta yang ditingkatkan kompetensinya							15 orang	130,000,000	15 orang	130,000,000	30 orang	260,000,000	Personil	Luar Daerah
1.05.02 .1.01.0 6		Pembinaan jabatan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah pembinaan pejabat fungsional satpol pp							4 kali	40,750,000	4 kali	40,750,000	8 kali	81,500,000	Personil	Prov. Kep. Babel
			Jumlah rakor pembinaan jabatan fungsional satpol pp							2 kali	26,000,000	2 kali	26,000,000	4 kali	52,000,000	Personil	Pangkalpinang
1.05.02 .1.01.0 8		Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketertarikan dan ketertiban umum	Pengadaan motor patroli							5 motor	74,500,000	-	-	0 5 motor	74,500,000	Tibumtranmas	Pangkalpinang
			Pengadaan HT							4 HT	12,000,000	-	-	0 4 HT	12,000,000	Tibumtranmas	Pangkalpinang
			Pengadaan spy cam							2 unit	9,100,000	-	-	0 2 unit	9,100,000	Tibumtranmas	Pangkalpinang
			Jumlah BBM							4500 liter	40,500,000	4500 liter	40,500,000	9000 liter	81,000,000	Tibumtranmas	Pangkalpinang
			Jumlah jenis sapras tibumtranmas									5 jenis	148,900,000		148,900,000	Tibumtranmas	Pangkalpinang
1.05.02 .1.02		Penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	Jumlah aktivitas penegakan perda dan perkada							52 kali	300,000,000	53 kali	350,000,000	105 kali	650,000,000	Penegakan Perda/Perkada	Prov. Kep. Babel
		Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur	Jumlah peserta sosialisasi perda dan perkada							-	-	100 orang	50,000,000	100 orang	50,000,000	Penegakan Perda/Perkada	Prov. Kep. Babel
		Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan gubernur	Penindakan pelanggar perda secara non yustisial (masyarakat/badan hukum)							12 orang	70,000,000	12 orang	70,000,000	24 orang	140,000,000	Penegakan Perda/Perkada	Prov. Kep. Babel
			Jumlah razia ASN							20 kali	60,000,000	20 kali	60,000,000	40 kali	120,000,000	Penegakan Perda/Perkada	Prov. Kep. Babel
		Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur	Penyelidikan pelanggar perda/perkada							10 kasus	60,000,000	10 kasus	60,000,000	20 kasus	120,000,000	Penegakan Perda/Perkada	Prov. Kep. Babel

				Penyidikan pelanggaran perda/perkada						3 kasus	90,000,000	3 kasus	90,000,000	6 kasus	180,000,000	Penegakan Perda/Perkada	Prov. Kep. Babel						
				Jumlah rapat koordinasi sekretariat PPNS						7 kali	20,000,000	7 kali	20,000,000	14 kali	40,000,000	Penegakan Perda/Perkada	Pangkalpinang						
1.05.02.1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)		Jumlah PPNS yang mampu melakukan pemberkasan penyidikan						-	0	25 orang	30,000,000	25 orang	30,000,000	Personil	Pangkalpinang						
1.05.02.1.03.01		Pengembangan kapasitas dan karier PPNS		Jumlah PPNS yang mampu melakukan pemberkasan penyidikan						-	0	25 orang	30,000,000	25 orang	30,000,000	Personil	Pangkalpinang						
1.05.04		Program Penanggulangan Kebakaran		Cakupan relawan pemadam kebakaran di kabupaten dan kota	0.13					0.13	147,000,000	0.39	977,000,000	0.39	1,124,000,000	Pemadam Kebakaran	Prov. Kep. Babel						
1.05.03.1.01		Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran		Jumlah dokumen peta daerah rawan kebakaran	0 dokumen					0 dokumen	147,000,000	1 dokumen	977,000,000	1 dokumen	1,124,000,000	Pemadam Kebakaran	Prov. Kep. Babel						
1.05.04.1.01.01		Penyediaan dan pemuktahiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran		Jumlah dokumen peta daerah rawan kebakaran	0 dokumen					0 dokumen	0	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	150,000,000	Pemadam Kebakaran	Prov. Kep. Babel						
1.05.04.1.01.03		Peningkatan kapasitas sumber daya manusia		Jumlah relawan kebakaran yang mampu menanggulangi kebakaran	100 orang					100 orang	77,000,000	100 orang	77,000,000	200 orang	154,000,000	Pemadam Kebakaran	Prov. Kep. Babel						
1.05.04.1.01.05		Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan kebakaran		Jumlah jenis sapras pemadam kebakaran	-					11 jenis	70,000,000	8 jenis	750,000,000	19 jenis	820,000,000	Pemadam Kebakaran	Pangkalpinang						
JUMLAH											7,749,732,334		11,282,154,300		14,475,347,891		22,660,684,391		23,238,228,000		45,898,912,391		

PANGKALPINANG, MARET 2020

KASAT POL PP
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG

YAMOWA HAREFA, AP.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750130 1994012 1 003

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF (URUSAN RUTIN)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
			2017		2018		2019		2020		2021		2022	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	Tingkat kepuasan aparaturnya terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	8,778,583,410	100%	7,715,791,800	100%	12,076,592,695	100%	8,004,646,351	100%	7,353,708,448	100%	7,620,217,195
		Peringkat SAKIP perangkat daerah	B	235,065,000	B	190,509,500	B	190,509,500	B	190,509,500	B	190,509,500	B	190,509,500
1.01	Pelayanan administrasi perkantoran (ATK, bahan bacaan, gaji non PNS, perjalanan dinas, makanan tambahan dan lain-lain)	Jumlah aparaturnya perangkat daerah yang terlayani selama 12 bulan	203 orang	7,332,386,410	203 orang	6,224,232,200	203 orang	6,224,232,200	203 orang	6,224,232,200	203 orang	6,224,232,200	203 orang	6,224,232,200
1.02	Peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya	Jumlah aparaturnya perangkat daerah yang memanfaatkan sarana dan prasarana perkantoran selama 12 bulan	203 orang	1,160,432,000	203 orang	1,048,043,000	203 orang	5,426,347,895	203 orang	1,154,801,551	203 orang	712,463,648	203 orang	770,372,395
1.03	Peningkatan disiplin aparaturnya	Jumlah aparaturnya yang meningkat disiplinnya	203 orang	50,700,000	203 orang	217,504,000	203 orang	50,000,000	203 orang	249,600,000	203 orang	41,000,000	203 orang	249,600,000
1.04	Peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya	Jumlah aparaturnya perangkat daerah yang	0	0	65 orang	35,503,100	105 orang	185,503,100	105 orang	185,503,100	105 orang	185,503,100	105 orang	185,503,100
1.05	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah	3 dokumen tahun 2017	167,615,000	2 dokumen	80,949,500	2 dokumen	80,949,500	2 dokumen	80,949,500	2 dokumen	80,949,500	2 dokumen	80,949,500
1.06	Penyusunan laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	5 dokumen tahun 2017	67,450,000	6 dokumen/la poran	109,560,000	6 dokumen/la poran	109,560,000	6 dokumen/la poran	109,560,000	6 dokumen/la poran	109,560,000	6 dokumen/la poran	109,560,000

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
Target	Rp.		
(15)	(16)	(17)	(18)
	42,770,956,489		
100%	41,818,408,989	Sekretariat	Provinsi Kep. Babel
B	952,547,500	Sekretariat	Provinsi Kep. Babel
203 orang	31,121,161,000	Sekretariat	Provinsi Kep. Babel
203 orang	9,112,028,489	Sekretariat	Pangkalpinang
203 orang	807,704,000	Sekretariat	Pangkalpinang
525 orang	777,515,500	Sekretariat	Pangkalpinang
10 dokumen	404,747,500	Sekretariat	Pangkalpinang
30 dokumen/laporan	547,800,000	Sekretariat	Pangkalpinang

TABEL 6.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF (URUSAN RUTIN)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kode	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi			
						Kinerja	Rp.	2019		2020		2021		2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		
	(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)
							5,544,752,713		7,327,274,300		9,330,647,200		9,598,647,200		9,598,647,200		41,399,968,613			
01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan pelayanankesekretariatan		100%	100%	5,461,949,613	100%	7,147,714,300	100%	9,121,087,200	100%	9,389,087,200	100%	9,389,087,200	100%	40,508,925,513	Sekretariat	Pangkalpinang	
			Peringkat SAKIP perangkat daerah			B	BB	82,803,100								BB	82,803,100	Sekretariat	Pangkalpinang	
1.01			Nilai SAKIP perangkat daerah		63.38			69.00	179,560,000	72.00	209,560,000	75.00	209,560,000	78.00	209,560,000	78.00	808,240,000	Sekretariat	Pangkalpinang	
			Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani selama 12 bulan		203 orang	203 orang	4,642,298,313	203 orang	5,465,543,300	233 orang	7,753,078,200	233 orang	7,753,078,200	233 orang	7,753,078,200	233 orang	33,367,076,213	Sekretariat	Pangkalpinang	
1.02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Jumlah aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana dan prasarana perkantoran selama 12 bulan		203 orang	203 orang	637,348,200	203 orang	1,179,549,000	233 orang	1,336,009,000	233 orang	1,336,009,000	233 orang	1,336,009,000	233 orang	5,824,924,200	Sekretariat	Pangkalpinang	
1.03	Peningkatan disiplin aparatur		Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat disiplinnya		203 orang	203 orang	182,303,100	203 orang	407,920,000	17 orang	32,000,000	233 orang	300,000,000	233 orang	300,000,000	233 orang	1,222,223,100	Sekretariat	Pangkalpinang	
1.04	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat kapasitasnya		0	-	0	65 orang	94,702,000	-	0	-	0	-	0	65 orang	94,702,000	Sekretariat	Pangkalpinang	
1.05	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan		Jumlah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah		3 dokumen	2 dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	0	2 dokumen	0	Sekretariat	Pangkalpinang	
			Jumlah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah		3 dokumen	2 dokumen	42,123,800	2 dokumen	70,000,000	2 dokumen	100,000,000	2 dokumen	100,000,000	2 dokumen	100,000,000	10 dokumen	412,123,800	Sekretariat	Pangkalpinang	
1.06	Penyusunan laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah		Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah		5 dokumen/laporan	6 dokumen/1 aporan	40,679,300	6 dokumen/1 aporan	109,560,000	6 dokumen/1 aporan	109,560,000	6 dokumen/1 aporan	109,560,000	6 dokumen/1 aporan	109,560,000	30 dokumen/1 aporan	478,919,300	Sekretariat	Pangkalpinang	

Tabel 6.2
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan serta Program
Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
Meningkatkan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	<p>1) Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</p> <p>2) Penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur</p> <p>3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</p> <p>4) Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran</p>	<p>a. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, melalui pelaksanaan pengamanan, patroli, penyelenggaraan deteksi dini, gelar pasukan, serta koordinasi dan sinergitas dalam rangka penyelenggaraan tibumtranmas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p> <p>b. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara, melalui pelaksanaan penertiban terhadap pelanggar perda/perkada;</p> <p>c. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat provinsi;</p> <p>d. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum, melalui pelaksanaan pelatihan bagi anggota satlinmas dalam rangka membantu penyelenggaraan</p>	<p>1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>2. Program Penanggulangan Kebakaran</p>

			<p>ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta membantu penanganan bencanadan kebakaran;</p> <p>e. Peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa Hak Asasi Manusia, melalui pelaksanaan pelatihan dan pengiriman peserta peningkatan kapasitas anggota satpol pp;</p> <p>f. Pembinaan jabatan fungsional satuan polisi pamong praja;</p> <p>g. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum, melalui pengadaan saptas yang dibutuhkan dalam menjalankan kewenangan dan tugas;</p>	
--	--	--	--	--

Tabel 6.3
Rumusan Perhitungan Outcome/Indikator Sasaran
Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Perhitungan
1.	Meningkatkan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	$\frac{\text{jumlah pelanggaran tibumtranmas tahun (n)}}{\text{jumlah pelanggaran tibumtranmas tahun (tahun dasar)}} \times 100$

Tabel 6.5
Rumusan Perhitungan Outcome/Indikator Program Wajib
Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Program	Indikator	Rumus Perhitungan	Keterangan
1.	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase penindakan pelanggaran tibumtranmas	Jumlah pelanggar tibumtranmas yang ditindak dibagi dengan jumlah pelanggar tibumtranmas yang diketahui atau dijumpai oleh Satpol PP dikalikan 100	Penindakan non yustisial terhadap perda/perkada tibumtranmas/ perda yang berkaitan dengan tibumtranmas yang dilakukan oleh Bidang Tibumtranmas
		Persentase penegakan pelanggar perda	Jumlah pelanggar perda dan perkada yang ditindak secara non yutisial dan yustisial dibagi dengan jumlah pelanggar perda dan perkada yang diketahui atau dijumpai oleh Satpol PP dikalikan 100	Penindakan non yustisial terhadap semua perda oleh Bidang Penegakkan Perda dan Perkada, serta penindakan yustisial oleh PPNS terhadap semua perda dan perkada (Perda dan Perkada Provinsi Kep. Babel yang mengandung sanksi hukum)
		Persentase satlinmas yang terlatih dalam penyelenggaraan kanrantibmas dan membantu penanganan bencana dan kebakaran	Jumlah anggota satlinmas yang mendapat pendidikan dan latihan dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, penanganan bencana dan kebakaran dibagi dengan jumlah anggota satlinmas se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikalikan 100	Dukungan terhadap kondisi tibumtranmas
		Persentase personil satpol pp yang berkompeten	Jumlah anggota Satpol PP yang memiliki sertifikasi/standarisasi sesuai dengan jabatannya dibagi dengan anggota Satpol PP Provinsi Kep. Bangka Belitung	PNS Satpol PP Pemerintah Provinsi Kep. Babel

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022, yakni tujuan terwujudnya pembangunan demokrasi dan meningkatkan tatakelola kebencanaan.

Berdasarkan tugas dan fungsinya Satpol PP bertugas dalam menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Memperhatikan tugas dan fungsinya melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, maka indikator kinerja Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD
Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2022)
			TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	65,65	27,20	33	30	27	27

BAB VIII PENUTUP

Keberhasilan penyelenggaraan pembinaan ketentraman, ketertiban masyarakat penegakan Peraturan Daerah dan perlindungan masyarakat merupakan tugas pokok dan fungsi dari Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pembinaan, ketertiban, penegakan Peraturan Daerah dan Perlindungan Masyarakat.

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Renstra Satpol PP Kepulauan Bangka Belitung ini mengacu sepenuhnya pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung. Keselarasan keduanya senantiasa harus dipelihara secara dinamis. Perubahan yang terjadi pada RPJMD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan berakibat pula pada penyesuaian dalam Renstra Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan demikian, pencapaian visi misi Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan selaras dengan pencapaian visi misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Renstra Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 ini diharapkan untuk dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan. Diseminasi renstra ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana organisasi akan dibawa (tujuan bersama), bagaimana kemajuan dan tingkat keberhasilan kelak akan diukur dengan demikian, seluruh kegiatan Satpol PP yang direncanakan akan terlaksana, terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan strategis.

Dengan dirumuskan Perubahan Renstra Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 ini, semua kegiatan Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan akan mengacu pada renstra yang telah

disepakati bersama. Setiap awal tahun, Renstra ini dijabarkan lebih lanjut dalam satuan Rencana Kinerja (Renja), sedangkan pencapaian kinerja dilaporkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Paling utama dokumen perubahan Renstra ini akan meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan tentunya diharapkan akan meningkatkan nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah.

Pangkalpinang, Maret 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

YAMOWA'A HAREFA, AP.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740130 199102 1 003